

POLICY BRIEF

EVALUASI IMPLEMENTASI PRASYARAT PUG

"Dalam Kebijakan Pembangunan & Anggaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2021"

Penulis
Sartika Dewi

A. PENDAHULUAN

Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan Pembangunan Kesetaraan Gender, sangat disadari sampai saat ini masih terjadi ketidakadilan gender yang dialami perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Termasuk ketidakadilan gender di berbagai pembangunan. Padahal salah satu tujuan pembangunan manusia (human development) di Indonesia adalah untuk mencapai kesetaraan gender dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik laki-laki maupun perempuan (Bappenas 2010).

Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam setiap tahap pembangunan, terutama dalam proses perencanaan dan perumusan kebijakan sangat di perlukan. Hal ini dimaksud agar kepentingan perempuan dan laki-laki tertampung, sehingga keduanya dapat menikmati hasil pembangunan secara berimbang. PUG bertujuan agar perempuan memiliki kesempatan dan akses terhadap proses dan hasil pembangunan. Pelaksanaan PUG di era ekonomi daerah, mengakibatkan tantangan dan peluangnya semakin besar. Di Indonesia terdapat beberapa perangkat hukum yang mengatur mengenai PUG sebagai strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan pembangunan. Secara spesifik pengaturan PUG dituangkan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Sebagai peraturan pelaksana dari Inpres No. 9 tahun 2000, dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah dan diperbaharui dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 juga dijadikan acuan pembentukan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014. Di dalamnya ditetapkan kebijakan PUG lintas bidang pembangunan sebagai salah satu prinsip dan landasan operasional bagi seluruh pelaksanaan pembangunan.

Berpedoman pada regulasi diatas Pemerintah Provinsi Riau juga menegeluarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Provinsi Riau. Pada kenyataannya, keberadaan peraturan terkait PUG belum mampu mendorong pelaksanaan PUG secara signifikan. Bahwa PUG sebagai salah satu strategi yang sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, membantu mengurai persoalan, persepsi, kebutuhan, serta prioritas yang berbeda yang dihadapi perempuan dan laki-laki, dan perbedaan tersebut tercermin dan terpadu dalam tahapan siklus perencanaan.

Dengan mengacu pada alur tersebut, implementasi PUG diperlukan prasyarat-

prasyarat pelaksanaan PUG baik di pemerintah pusat maupun di daerah yaitu berupa adanya prasyarat awal, komponen-komponen kunci dan keluaran-keluaran (output) untuk menjadi dasar bagi terlaksananya PUG baik di lingkungan pemerintah, swasta maupun lembaga masyarakat agar tujuan yang ingin di capai yaitu kesetaraan dan keadilan gender dapat terwujud di Provinsi Riau. Untuk itu, melalui kajian ini diharapkan menjadi dasar sekaligus bahan evaluasi dalam menetapkan kebijakan-

yang lebih responsive terhadap isu-isu gender pada tahun berikutnya. Kajian ini diharapkan menjadi evaluasi terhadap implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di Provinsi Riau. Secara umum kajian ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan prasyarat pengarusutamaan gender di daerah sebagaimana mandat intruksi presiden No. 9 tahun 2000 kedalam kebijakan perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

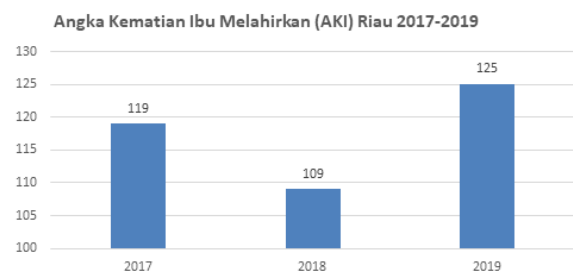
B. KONTEKS MASALAH KETIMPANGAN GENDER DI DAERAH

Pemerintah daerah Provinsi Riau melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPAKB), menetapkan prioritas program terhadap pengarusutamaan gender yaitu program penguatan kelembagaan PUG dan program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan. Artinya, melalui dua program tersebut adalah untuk merespon kondisi masalah berkaitan dengan ketimpangan gender di daerah.

Selain itu, isu-isu strategis daerah yang berkaitan dengan ketimpangan gender yang mendesak untuk diantisipasi, seperti; tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, angka kematian ibu dan anak melahirkan, serta ketimpangan akses layanan dasar terhadap masyarakat miskin, kelompok disabilitas, dan masyarakat usia lanjut. Berangkat dari permasalahan tersebut seharusnya menjadi basis dalam penyusunan kebijakan rencana pembangu-

nan dan anggaran daerah setiap tahunnya.

Angka kematian ibu (AKI) disebabkan tiga faktor utama yaitu gangguan kehamilan, melahirkan dan nifas, berdasarkan data yang dilaporkan melalui layanan kesehatan di seluruh daerah se provinsi Riau, total AKI tahun 2019 mencapai 125 kasus mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 2018 dengan 109 kasus dan tahun 2017 dengan 119 kasus.

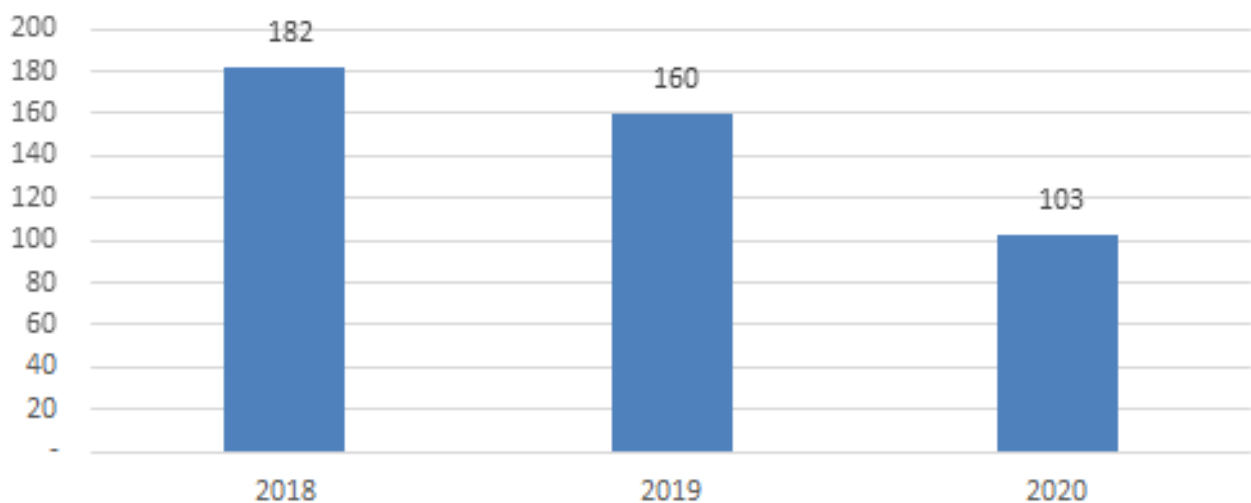


Sumber; Profik Kesehatan Prov. Riau tahun 2019

Kasus lainnya yang berkaitan dengan isu gender adalah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Melalui data laporan pada UPT pemberdayaan perempuan dan anak provinsi Riau, sepanjang tiga tahun terakhir (2018-2020) kasus kekerasan perempuan dan anak berjumlah 445 kasus dengan tren penurunan setiap tahunnya, dari

tahun 2018 mencapai 182 kasus, turun ditahun 2019 dengan 160 kasus, dan ditahun 2020 dengan 103 kasus. Kasus kekerasan perempuan dan anak secara akumulasi terjadi di seluruh daerah di Riau, yang di diminasi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak.

Kasus kekerasan perempuan & anak di Riau 2018-2020



Sumber: UPT PPA Provinsi Riau, tahun 2020

C. ANALISIS PRASYARAT PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DI DAERAH

Implementasi PUG di daerah, sebagaimana dimandatkan melalui Inpres No. 9 tahun 2000, terdapat tujuh prasyarat awal pelaksanaan PUG di daerah, yang menjadi dasar untuk pelaksanaan PUG baik dilingkungan pemerintah, swasta maupun lembaga masyarakat lainnya. Ketujuh prasyarat PUG tersebut diuraikan sebagai berikut;

Berdasarkan kebijakan pemeritnah daerah, komitmen terhadap implentasi pengarusutamaan gender sudah termuat dalam berbagai kebijakan, diantara melalui peraturan gubernur, dan kebijakan teknis dari sectoral seperti keputusan Dinas PPA, Nota kesepakatan, surat edaran dan fakta integritas dari lintas sektor;

1. Komitmen Para Pihak

Matriks; Regulasi daerah tentang implementasi PUG di daerah; diantaranya;

Peraturan Gubernur	Keputusan Gubernur	Keputusan /surat Edaran/Nota kesepakatan/pakta integritas/Kerjasama
<p>Pergub Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Provinsi Riau</p>	<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.129/1/2020 Uraian Tugas Motivator Penggerak Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi Riau Keputusan Gubernur Riau Susunan Tim Teknis Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Provinsi Riau. 	<ol style="list-style-type: none"> Surat Edaran Gubernur Riau No. 34/SE/2020 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Provinsi Riau Melalui Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG) Surat Edaran Gubernur Riau No. 34/SE/2020 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Provinsi Riau Melalui Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG) Surat Edaran No.98/SE/2018 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Provinsi Riau Melalui Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG)

2. Kebijakan dan Program

Berdasarkan kebijakan RPJMD 2019-2024 Provinsi Riau, strategi implementasi PUG di daerah termasuk dalam kebijakan strategis daerah yaitu terdapat pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Adapun Arah Kebijakan dan sasaran Program

Pembangunan Daerah terkait implementasi PUG, ditetapkan pada sasaran dan indikator Meningkatnya Kesetaraan Gender, terdiri dari Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak dan Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan.

Secara khusus kedua program tersebut menjadi urusan sektoral pada dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Namun implementasi anggaran PUG

menjadi mainstreaming dalam kebijakan seluruh OPD daerah, dengan mengacu pada ketentuan Pokja yang di ketuai oleh Bappeda di masing-masing daerah.

Tabel; Program dan Indikator Kinerja PUG di Provinsi Riau

Uraian Program	Indikator Kegiatan	Target 2020	Anggaran 2020	Target 2024	Anggran 2024
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase kelembagaan pengarusutamaan Gender yang aktif	50,00	Rp. 650 M	70,00	Rp. 843 M
Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang ditangani	70,00	Rp. 2.3 T	90,00	Rp. 30 T
	Persentase Kabupaten/kota menuju Kabupaten/Kota layak anak	74,00		89,00	

Sumber; RPJMD Riau 2019-2024

3. Kelembagaan PUG di Daerah

Berdasarkan mandate peraturan Mendagri No. 15 tahun 2008, daerah wajib membentuk kelembagaan PUG daerah yang disebut Pokja

PUG dan focal point. Adapun kelembagaan PUG di Riau yang telah terbnentuk, sebagai berikut;

Keputusan Gubernur No. 129/2020	Keputusan Kepala Dinas DPPA NO.188-4/2020
<p>1. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi Riau</p>	<p>1. Pembentukan Focal Point Pengarusutamaan Gender 2. Penunjukan Fasilitator Pengarusutamaan Gender 3. Pembentukan Warung Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender</p>

Dalam implementasinya, Dinas PPA, PP dan KB, secara khusus berfungsi sebagai leading sektor dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PUG di daerah, dalam analisis gender budget statement (GBS) dan Gender Analysis Patway (GAP), yang dibentuk melalui keputusan kepala dinas terkait adanya warung PPRG dan menyediakan fasilitator pengarusutamaan gender.

4. Sumber Daya yang Memadai

Implementasi PUG di daerah, harus didukung

dengan sumber daya yang memadai seperti ketersediaan SDM yang memadai, dan didukung dengan sarana serta pembiayaan yang cukup. Faktanya di Provinsi Riau dari ketiga kriteria tersebut telah direalisasikan dalam kebijakan, baik program maupun anggaran daerah, seperti pada tahun terakhir tahun 2019-2020. Sementara dalam meningkatkan SDM peningkatan kapasitas menjadi penting, sampai saat ini sudah terdapat 20 orang fasilitator di daerah khusus PUG, yang telah mendapat sertifikat dari kementerian PPA.

Komponen sumber daya PUG daerah	Keterangan
<p>1. Sumber daya manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> Kelembagaan pokja PUG Focal point PUG Program khusus PUG 	<p>Leading; Bappeda</p>
<p>2. Sarana Penunjang</p> <ul style="list-style-type: none"> Warung PPRG Kantor Dinas PPA 	<p>Leading; Dinas PPA, PP, KB</p>
<p>3. Pembiayaan</p> <ul style="list-style-type: none"> Alokasi Anggaran PUG 	<p>RKA dinas PPA, PP, KB</p>

5. Data Terpilah dan Sistem informasi yang memadai

Salah satu dukungan untuk mengimplemntasikan PUG di daerah yaitu ketersediaan data yang memadai, di Provinsi Riau dalam tahun 2018-2018 telah tersedia data terpilah gender yang disajikan dalam

angka statistik Riau, adapun data yang tersedia meliputi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, penyajian indeks pembangunan gende (IPG) dan Indeks Pemberdayaan gender (IDG).

Tabel; Statistik data terpilah gender Provinsi Riau 2018-2019

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)		IPG (point)	IDG (point)
	Laki-laki	Perempuan		
Kuantan Singingi	167,794.00	159,522.00	90,57	61,63
Indragiri Hulu	226,505.00	215,284.00	87,33	59,00
Indragiri Hilir	379,805.00	360,793.00	82,57	59,59
Pelalawan	247,994.00	235,628.00	88,51	54,59
Siak	251,317.00	238,679.00	88,58	45,58
Kampar	446,693.00	424,424.99	89,13	61,18
Rohul	354,914.00	337,206.00	82,13	62,48
Bengkalis	293,804.00	279,199.00	90,08	53,53
Rohil	366,420.00	348,782.00	85,22	49,99
Kepulauan Meranti	95,110.00	90,406.00	86,20	64,86
Pekanbaru	586,299.00	557,060.00	93,12	61,05
Dumai	158,287.00	150,525.00	90,86	59,90
Riau	3,574,942.00	3,396,803.00	88,43	75,73

Sumber; BPS Provinsi Riau

6. Tool/Alat

Untuk mendukung percepatan implemantasi PUG di daerah, maka kelengkapan instrument atau tool analisis gender sangat diperlukan, diantaranya instrument analisis GBS/GAP, pan-

sering terjadi pergantian personil yang dilatih sehingga dalam mengimplemantasikan dalam proses penyusunan PPRG selalu terhambat.

Jenis Modul/panduan PPRG di daerah	Keterangan;
<ul style="list-style-type: none"> Buku Pelatihan PUG di Provinsi dan Kabupaten/kota 	Berisi; panduan umum PUG daerah
<ul style="list-style-type: none"> Modul PPRG daerah 	Berisi; materi teknis PPRG, tools GBS/GAP

duan PPRG, modul-modul pelatihan untuk penguatan SDM. Sampai saat ini telah tersedia berbagai bahan/buku/panduan/materi pelatihan PPRG di Provinsi Riau.

Namun, dalam implementasinya belum semua unsur OPD yang dilatih mampu memahami materi secara baik, dikarenakan

Untuk itu, penting dalam proses pelatihan PPRG, dinas terkait secara khusus menunjuk personil tetap untuk perencanaan PU di masing-masing OPD terkait. Selain itu, belum semua dinas di Provinsi Riau melaporkan hasil analisis gender (GBS/GAP) sebagai basis perencanaan dan penganggaran gender.

7. Jejaring/Net-Working

Untuk mempercepat implementasi PUG di daerah, maka pemerintah daerah harus memperluas jejaring/networking dalam mendukung pelaksanaan PUG di daerah, ada-

pun jejaring yang harus dilibatkan antara lain; NGO/CSO, Universitas, ormas, dan perusahaan swasta lainnya.

Adapun jejaring PUG di Provinsi Riau yang telah terbentuk, sebagai berikut;

Jejaring PUG Provinsi Riau	Keterangan
<ul style="list-style-type: none"> Kerjasama dengan 7 Lembaga Perwakilan Masyarakat 	MOU Tahun 2020
<ul style="list-style-type: none"> Kerjasama dengan 5 Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha 	MOU Tahun 2020

D. ANALISIS KEBIJAKAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER DI DAERAH

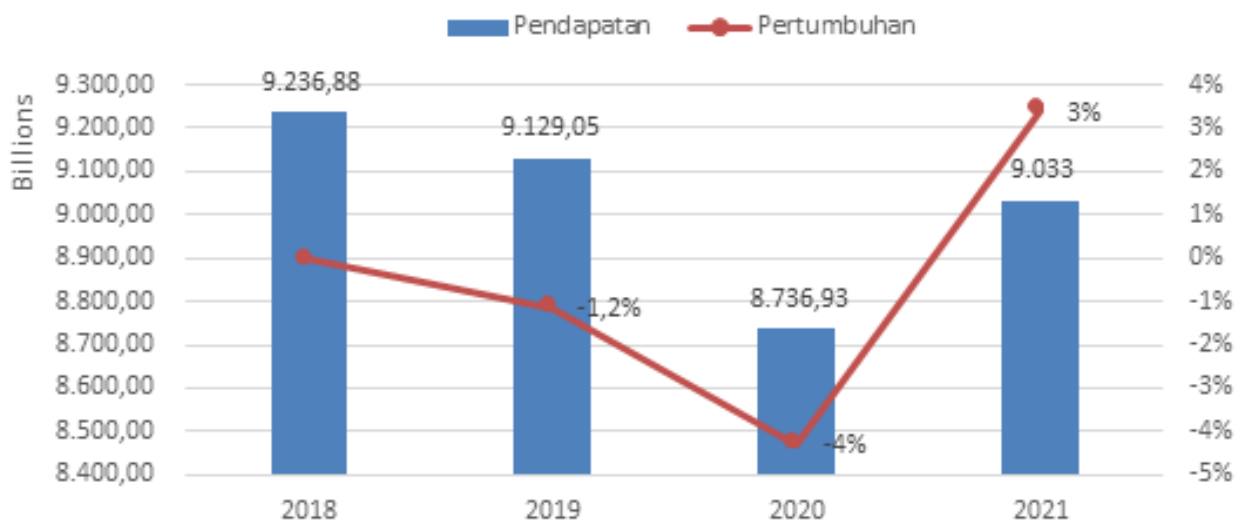
Kebijakan program dan anggaran berkaitan dengan pengarusutamaan gender, dalam kajian ini secara spesifik yang dinalisis yaitu menyangkut kepentingan masyarakat rentan seperti perlindungan perempuan dan anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin serta masyarakat usia lanjut. Sebagaimana dengan kondisi masalah yang diuraikan diatas, maka pemerintah daerah harus memprioritaskan anggarannya untuk penyelesaian masalah-masalah tersebut, dengan melaksanakan rencana aksi pengarusutamaan gender sebagaimana mandate Peraturan Gubernur Riau No. 18 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah.

1. Kapasitas Fiskal Daerah

Kondisi keuangan daerah Provinsi Riau dalam priode empat tahun terakhir (2018-2021) terus terjadi penurunan, bahkan dengan terjadinya pandemi covid-19 pada tahun 2020 yang lalu, kondisi keuangan mengalami penurunan cukup signifikan yang sebabkan sejumlah item pendapatan daerah tidak mencapai target yang ditetapkan. Selain itu, pemerintah daerah diwajibkan melakukan rasionalisasi dan realokasi anggaran untuk penanganan covid-19, akibatnya sejumlah program prioritas daerah, khususnya berkaitan dengan program kegiatan pengarusutamaan gender tidak dapat dibiayai secara maksimal.

Pertumbuhan pendapatan daerah Provinsi Riau secara umum mengalami trend penurunan, terutama pada tahun 2020 menurun cukup signifikan akibat pandemi covid-19. Dari tahun 2018 dengan pendapatan

Tabel; Rencana pemanfaatan DBH DR Kabupaten Siak Tahun 2021



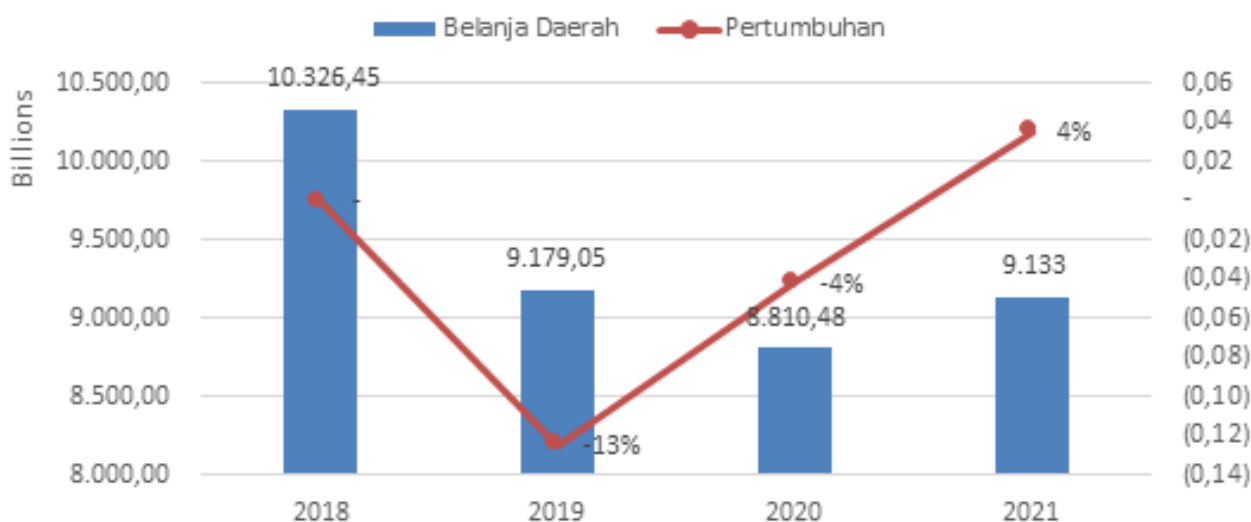
Sumber; Dokumen APBD Riau Ta. 2018-2021

mencapai Rp9,2 triliun, turun diangka minus -1,2% di tahun 2019 menjadi Rp9,1 triliun, selanjutnya pada tahun 2020 akibat covid-19 turun signifikan menjadi Rp8,4 triliun atau -4% dan di tahun 2021 di proyeksikan meningkat sebesar 3% atau senilai Rp9,03 triliun. Meskipun pendapatan daerah mengalami fluktuasi, kapasitas fiskal daerah masih cukup leluasa untuk menentukan pembiayaan program prioritas, salah satunya program kegiatan untuk percepatan impelentasi PUG di Provinsi Riau.

Begitu juga pada belanja daerah secara umum mengalami penurunan dalam priode empat tahun, dari tahun 2018 sebesar Rp10,3 triliun

turun menjadi Rp9,1 triliun, selanjutnya pada tahun 2020 turun signifikan menjadi Rp8,8 triliun, penurunan belanja pada tahun 2020 akibat kondisi pandemi, sehingga terjadi penyesuaian belanja dan tidak tercapainya sejumlah target pendapatan daerah. kemudian pada tahun 2021, belanja daerah kembali diproyeksikan meningkat sebesar 3% atau menjadi Rp9,1 triliun. Sejalan dengan terjadinya peningkatan belanja daerah, sudah seharusnya isu-isu strategis daerah terutama menyangkut persoalan gender dapat dibiayai secara memadai, apalagi pada tahun 2020 sejumlah program terkait pengarusutamaan gender terjadi rasionalisasi.

Grafik; Trand Belanja Daerah Provinsi Riau selama Priode 2018-2021



Sumber; Dokumen APBD Prov. Riau Ta. 2018-2021

2. Fakta Kebijakan Anggaran Responsif Gender di Provinsi Riau

Kebijakan anggaran untuk mendukung program pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, secara spesifik terdapat pada tiga OPD utama yaitu Dinas Dinas PPPA & KB, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. Secara tren

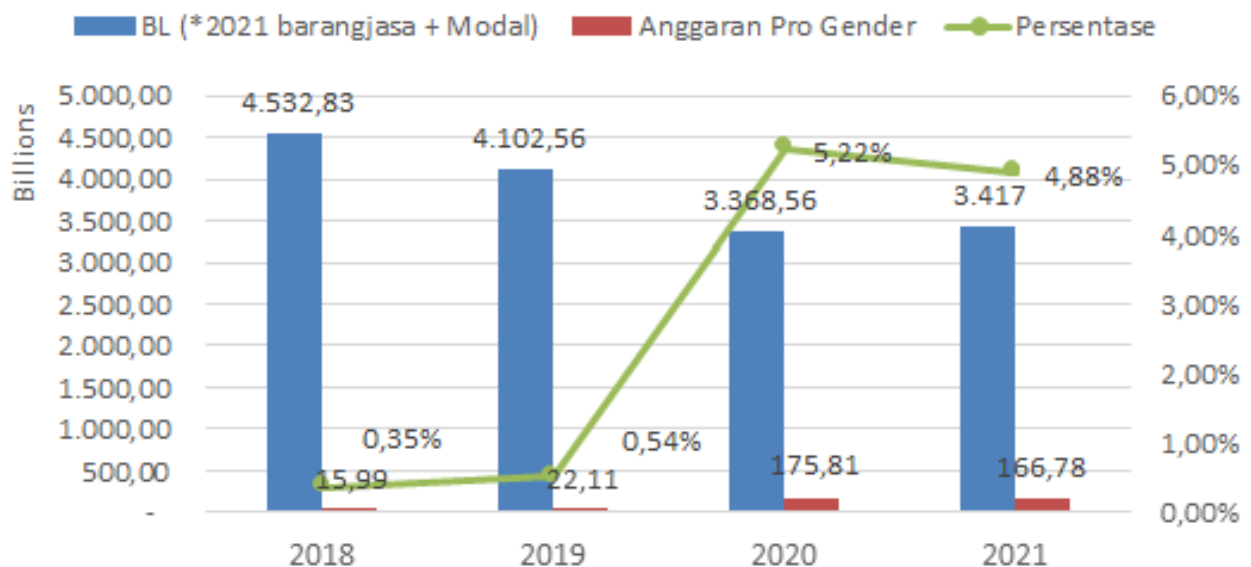
alokasinya dalam empat tahun terkahir dari 2018-2021 adanya peningkatan yang cukup baik, misalnya pada tahun 2018 dialokasikan sebesar Rp15 milyar atau setara 0,3% dari belanja langsung, kemudian meningkat pada

tahun 2019 menjadi Rp22,1 milyar atau setara 0,5% dari belanja langsung, selanjutnya pada tahun 2020 juga terjadi kenaikan meskipun terjadi penurunan pendapatan daerah akibat pandemi covid, yaitu sebesar Rp 175 milyar atau setara 5,2% dari belanja langsung, dan pada tahun 2021 yang diproyeksikan sebesar Rp 166 milyar, atau setara 4,8% dari total belanja langsung (barangjasa dan modal).

ngan persoalan gender dan inklusi sosial.

Pada proyeksi anggaran 2021, alokasi anggaran yang responsif gender dan inklusi sosial cenderung lebih rendah dari belanja untuk program lainnya sebagaimana terdapat pada 3 OPD yaitu Dinas PPPA & KB, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. alokasi anggaran gender tahun 2021 yaitu sebesar Rp 166,7 M

Grafik; Rasio Anggaran Responsif Gender Terhadap Belanja Langsung di Provinsi Riau Tahun 2018-2020



Sumber; Dok. APBD Prov. Riau Tahun 2018-2021

Melihat fakta alokasi anggaran pada grafik diatas, dengan terjadinya peningkatan alokasi anggaran setiap tahunnya, seharusnya persoalan gender dan inklusi sosial dapat teratasi secara maksimal, sebaliknya justru persoalan gender cenderung masih sangat tinggi dan setiap tahunnya terjadi berulang-ulang seperti angka kematian ibu melahirkan (AKI), dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Artinya, dengan alokasi anggaran yang besar tidak berbanding lurus dengan penyelesaian kasus-kasus yang berkaitan de-

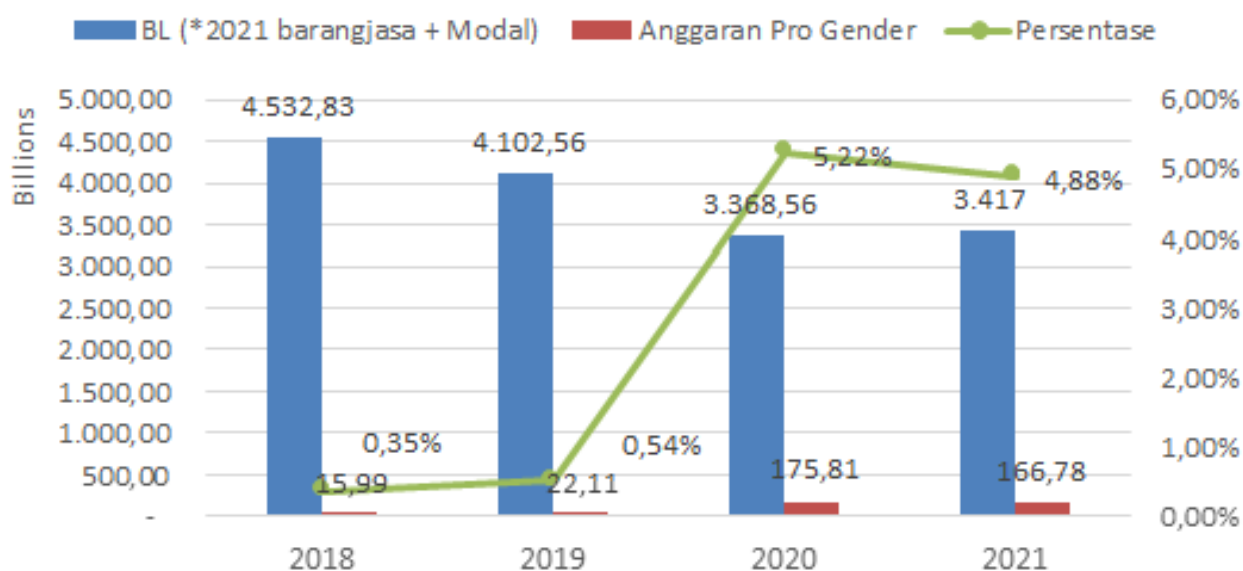
atau setara 13% dari total belanja ketiga OPD tersebut, lebih rendah dari belanja untuk program penunjang (kebutuhan gaji dan perkantoran) yaitu sebesar Rp667 milyar setara 52%, dan belanja program lainnya yang tidak berkaitan langsung dengan persoalan gender dan inklusi sosial yaitu sebesar Rp454,7 milyar atau setara 35% dari keseluruhan belanja ketiga OPD tersebut.

tahun 2019 menjadi Rp22,1 milyar atau setara 0,5% dari belanja langsung, selanjutnya pada tahun 2020 juga terjadi kenaikan meskipun terjadi penurunan pendapatan daerah akibat pandemi covid, yaitu sebesar Rp 175 milyar atau setara 5,2% dari belanja langsung, dan pada tahun 2021 yang diproyeksikan sebesar Rp 166 milyar, atau setara 4,8% dari total belanja langsung (barangjasa dan modal).

ngan persoalan gender dan inklusi sosial.

Pada proyeksi anggaran 2021, alokasi anggaran yang responsif gender dan inklusi sosial cenderung lebih rendah dari belanja untuk program lainnya sebagaimana terdapat pada 3 OPD yaitu Dinas PPPA & KB, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. alokasi anggaran gender tahun 2021 yaitu sebesar Rp 166,7 M

Grafik; Rasio Anggaran Responsif Gender Terhadap Belanja Langsung di Provinsi Riau Tahun 2018-2020

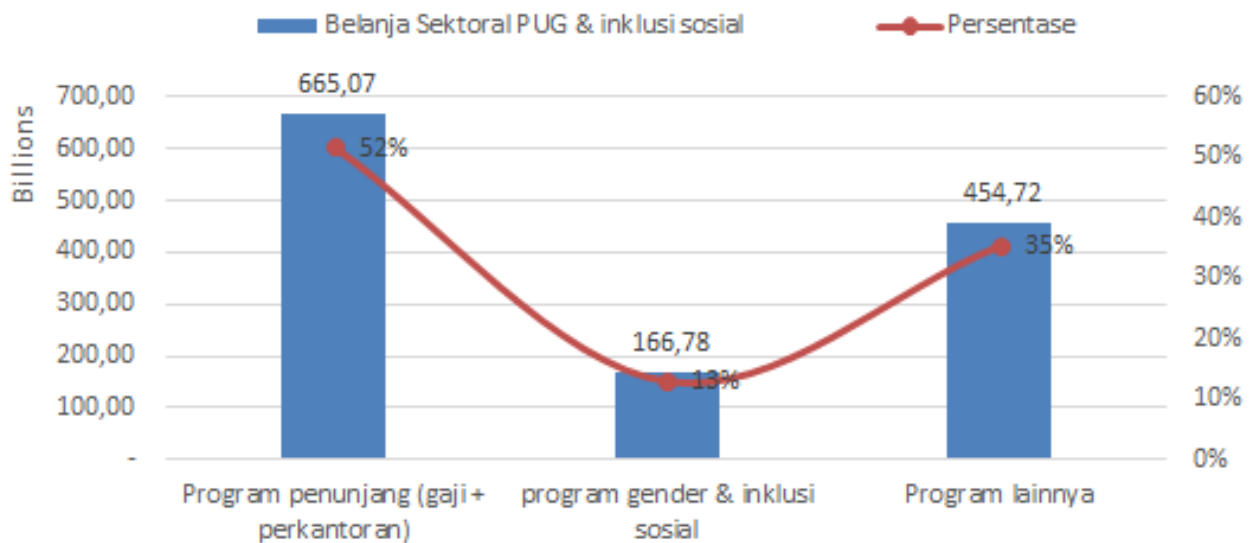


Sumber; Dok. APBD Prov. Riau Tahun 2018-2021

Melihat fakta alokasi anggaran pada grafik diatas, dengan terjadinya peningkatan alokasi anggaran setiap tahunnya, seharusnya persoalan gender dan inklusi sosial dapat teratasi seara maksimal, sebaliknya justru persoalan gender cenderung masih sangat tinggi dan setiap tahunnya terjadi berulang-ulang seperti angka kematian ibu melahirkan (AKI), dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Artinya, dengan alokasi anggaran yang besar tidak berbanding lurus dengan penyelesaian kasus-kasus yang berkaitan de-

atau setara 13% dari total belanja ketiga OPD tersebut, lebih rendah dari belanja untuk program penunjang (kebutuhan gaji dan perkantoran) yaitu sebesar Rp667 milyar setara 52%, dan belanja program lainnya yang tidak berkaitan langsung dengan persoalan gender dan inklusi sosial yaitu sebesar Rp454,7 milyar atau setara 35% dari keseluruhan belanja ketiga OPD tersebut.

Grafik; Komposisi Belanja Urusan Sektoral Pengarusutamaan Gender & Inklusi Sosial Provinsi Riau Tahun 2021



Sumber; Dok. APBD Provinsi Riau Tahun 2021

Berdasarkan urusan sektoral, dinas yang berkaitan langsung terhadap implemtasi PUG di daerah yaitu Dinas Pemberdayaan perempuan dan anak (DPPPA), sedangkan dinas Sosial dan dinas kesehatan lebih pada belanja berkaitan dengan inklusi sosial. Pada proyeksi tahun 2021, dari total Rp166,7 milyar alokasi anggaran gender dan inklusi Sosial,

alokasi terbesar terdapat pada Dinas Kesehatan mencapai Rp152 milyar, dan Dinas Sosial sebesar Rp9,6 milyar, sedangkan Dinas PPPA dan KB yang merupakan leading sektor terhadap implementasi rencana aksi PUG di daerah dengan alokasi anggaran paling rendah yaitu sebesar Rp4,1 milyar.

Tabel; Rincian Program dan Anggaran Pengarusutamaan gender & inklusi sosial Tahun 2021

Uraian Program	Anggaran
Dinas PP, PA, & KB	4.129.840.839
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga berencana	323.856.000
Program Pembinaan Keluarga Berencana	305.325.725
Program Pemenuhan Anak	469.890.372
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1.870.840.830
Program pengelolaan sistem data gender dan anak	85.479.109

Program pengendalian penduduk	235.841.492
Program peningkatan kualitas keluarga	91.939.365
Program perlindungan khusus anak	249.292.298
Program perlindungan perempuan	497.375.648
Dinas Sosial	9.670.044.363
Program pemberdayaan sosial	146.085.969
Program penanganan bencana	385.731.519
Program perlindungan dan jaminan sosial	330.010.092
Program rehabilitasi sosial	8.808.216.783
Dinas Kesehatan	8.808.216.783
Program pemberdayaan masyarakat bidang sosial	3.298.795.000
Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat	149.676.430.392
Total	166.775.110.594

Berdasarkan tabel diatas, hasil identifikasi program dan anggaran tahun 2021 yang berkaitan langsung isu gender dan inkulis sosial terdapat pada tiga OPD utama yaitu; melalui Dinas PPPA dan KB terdapat 9 program yang berkaitan langsung terhadap

implementasi PUG dan penanganan isu-isu gender, selanjutnya pada Dinas Sosial terdapat 4 program berkaitan dengan inklusi sosial, dan pada Dinas Kesehatan terdapat 2 Program yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan inklusi sosial.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis diatas, terhadap implementasi prasyarat PUG dalam kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah di Provinsi Riau, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut;

- Kasus-kasus yang berkaitan dengan ketimpangan gender seperti kematian ibu melahirkan, kematian anak dan balita, serta kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi terjadi di Provinsi Riau dengan rata-rata kejadian setiap tahunnya diatas angka 100 kasus. Dengan demikian, pemerintah daerah melalui dinas terkait segera mempercepat implementasi renaksi PUG kedalam semua kebijakan pembangunan daerah, serta mengalokasikan anggaran yang memadai sehingga kejadian kasus-kasus tersebut dapat diantisipasi secara maksimal;
- Implementasi prasyarat PUG sebagaimana dimandatkan Inpres No. 9 tahun 2000 belum berjalan efektif, hal itu terlihat pada prasyarat PUG yang tidak terpenuhi seperti jejaring atau kolaborasi para pihak, dan internalisasi kebijakan dan program spesifik gender hanya terdapat pada satu dinas yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dengan demikian, kedepan pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh pada setiap OPD pelaksana dalam mengimelementasikan PUG didaerah, sekaligus membangun kerjasama para pihak sebagai bentuk partisipasi publik dan akuntabilitasn pelaksanaan PUG di daerah.
- Komitmen pemerintah Provinsi Riau terhadap implementasi PUG di daerah cukup baik sebagaimana telah diterbitkannya beberapa kebijakan daerah mulai dari peraturan gubernur, keputusan gubernur, dan SK kepala dinas terkait, serta telah dialokasikannya anggaran untuk mendukung percepatan implementasi PUG di daerah. Namun, dengan dikeluarkannya regulasi terkait implementasi gender tersebut belum sepenuhnya dapat menyelesaikan masalah gender dan inklusi sosial, seperti kekerasan perempuan dan anak, kematian ibu melahirkan, kematian anak dan balita, penyandang disabilitas dan masyarakat usian lanjut.
- Kebijakan anggaran pro gender dan inklusi sosial di Provinsi Riau dalam empat tahun terakhir dari 2018-2021 terdapat trend peningkatan yang baik, secara rata-rata 3% atau sebesar Rp95 milyar setiap tahunnya. Untuk itu, diharapkan pemerintah daerah dapat memanfaatkan anggaran yang ada secara optimal, terutama penggunaan anggaran tahun 2021 untuk mendukung kinerja penurunan angka ketimpangan gender di daerah.



Social Media

 **@FitraProvinsiRiau**

 **Fitra Provinsi Riau**

 **Fitra Riau**

Kontak

sekretariat.fitrariau@gmail.com - Email

www.fitrariau.org - Website